

SKRIPSI



**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB
PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

**Oleh
SITI HARDIYANTI DUMBI
NIM B 121 13 313**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG

TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA MAKASSAR

OLEH

SITI HARDIYANTI DUMBI

B 121 13 313

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG
TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

SITI HARDIYANTI DUMBI

B121 13 313

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk

Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana

Prodi Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada Hari Rabu, 29 Maret 2017

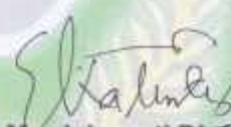
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. M. Djafar Saidi S.H., M.H.
NIP. 19521111 198103 1 005


Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H.
NIP.19820513 200912 2 001

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 1986

PERSETUJUAN PEMBIMBING

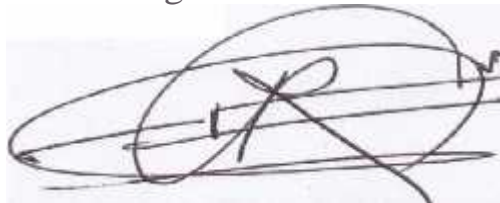
Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Siti Hardiyanti Dumbi
Nomor Pokok : B12113313
Judul : Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak yang
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Kantor
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Maret 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Diafar Saidi, SH.,MH

Nip: 19521111 198103 1 005

Pembimbing II



Eka Merdekawati Djafar, SH.,MH

Nip: 19820513 200912 2 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SITI HARDIYANTI DUMBI
Nomor Pokok	: B12113313
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Siti Hardiyanti Dumbi (B 121 13 313), dengan judul *Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar* (Dibimbing oleh Muhammad Djafar Saidi selaku pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar selaku pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer dikategorikan sesuai jenis data. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang hasilnya dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan telah diterapkan dengan benar pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar. Faktor pendukung penerapan sanksi adalah kemudahan dalam pembayaran dan adanya kesadaran wajib pajak. Faktor penghambat penerapan sanksi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, faktor ekonomi, serta kurangnya pemahaman tentang perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Sanksi Administratif, Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.** Skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan sebesar-besarnya kepada yang terkasih kedua orang tua penulis, **Ayahanda Arnan Dumbi, SE. dan Ibunda Henny Tawakkal** tercinta, dan adik **Muhammad Hardiyanto Dumbi** tersayang, yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan batuan dari berbagai pihak yang terkait. Melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, doa dan rasa syukur kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan beserta seluruh jajaran wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu menyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H. M.H., Dr. Muh. Hasrul, S.H, M.H. dan Ruslan Hambali, S.H., M.H., selaku Tim Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yang telah menyediakan fasilitas dan informasi selama melaksanakan penelitian.
7. Kepala UPTD PBB Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar beserta Staff yang telah menyediakan fasilitas dan informasi selama melaksanakan penelitian.
8. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2013 ASAS, terkhusus teman-teman dari program Studi Hukum Administrasi Negara.
9. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone terkhusus Ius Civitatis' 13.
10. Teman-teman Ridha Yunsari, Andi Nurul Ulum, Elvira Yunitasari Akbar, Syarifah Devi Isnaeni Assagaf, Ratna Dillah, A.Wira Nurramadani, Ika Astuti, Ulvianti Diansari, Asfira Askar, Ni Kadek Sri Astuti, dan Uswah Khaeri Fadillah yang dari awal MABA sampai saat ini masih saling menyemangati.

11. Teman-teman KKN Gelombang 93 Kabupaten Wajo Kecamatan Pammana.
12. Teman-teman posko Lempa, Nurul Fadillah Sultan, Dita Unru, Sri Wahyuningsih, Nurul Iftihan, Yudistira Dandan, dan Muhammad Mulyadi, terimakasih telah menjadi keluarga baru penulis selama diposko.
13. Teman-teman magang di badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Makassar, Ulvi, Ridha, Uswah, Vian, Novri, dan Arief.
14. Beserta pihak-pihak lain yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas kerjasama dan motivasinya selama ini.

Selanjutnya penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Dia Sang Pencipta. Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Penulis juga mempersilahkan kepada para pembaca untuk meberikan masukan dan kritikan terhadap skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan anugerah-Nya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah menggapai cita dan cinta serta tak lupa shalawat dan taslim kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad SAW.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Daftar isi.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak	
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Jenis-jenis Pajak	11
B. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	13
2. Sumber dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.....	15
3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	16
4. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.....	18
5. Tata Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	21
6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.....	23
C. Sanksi Administrasi	
1. Pengertian Sanksi Administrasi	26
2. Sanksi Administrasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	30
3. Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administrasi.....	32
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39

C. Populasi dan Sampel	
1. Populasi	40
2. Sampel.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	
1. Data Primer	40
2. Data Sekunder	40
E. Teknik Pengumpulan Data	
1. Wawancara.....	41
2. Dokumentasi atau Studi Pustaka	41
F. Analisis Data	41
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	43
B. Penerapan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	55
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara yang menganut konsep negara hukum (*rechtstaat*) pada dasarnya memiliki politik hukum sebagai suatu landasan atau dasar bagi pembangunan hukum. Oleh karena itu, politik hukum nasional di bentuk dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita ideal negara. Demikian di Indonesia, politik hukum nasional selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Wujud pelaksanaan dari politik hukum nasional adalah melalui kebijakan hukum yang dibuat oleh Pemerintah bersama dengan DPR. Kebijakan hukum sering diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelayanan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Satu bidang yang menjadi sasaran kebijakan hukum pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara selain sumber pendapatan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUUAPBN) yang disusun oleh pemerintah yang menempatkan pajak sebagai pendapatan utama. Demikian pentingnya pajak bagi negara, pemungutannya didasarkan pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh

manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan. Pengaturan pajak bumi dan bangunan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan, Undang-undang pajak bumi dan bangunan juga mengatur mengenai sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun terlambat memenuhi kewajibannya. Dalam ketentuan perpajakan sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak ada dua macam, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif itu sendiri juga dapat dibagi tiga yakni sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda dan sanksi berupa kenaikan. Bagi wajib pajak yang terlambat memberikan laporan tentang objek pajak menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari pajak terutang. Adapun bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan setelah jatuh tempo, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dapat dikenakan denda administrasi sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pembuat undang-undang memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan

pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Meskipun secara normatif pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun pada kenyataannya pemerintah belum secara optimal melakukan penegakkan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan sanksi kepada wajib pajak tersebut. Salah satu faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan sanksi di bidang hukum pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya.

Tabel 1
Laporan tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan tahun 2015 dan 2016

KECAMATAN	JUMLAH OBJEK PAJAK TERUTANG	NILAI PAJAK TERUTANG	JUMLAH OBJEK PAJAK TERUTANG	NILAI PAJAK TERUTANG
	2015		2016	
MARISO	2,972	1,009,934,827	2,961	1,115,281,130
MAMAJANG	2,245	690,867,510	2,707	1,261,049,520
TAMALATE	16,675	6,382,088,012	19,386	7,868,613,652
MAKASSAR	2,145	673,598,143	2,168	715,134,704
UJUNG PANDANG	1,420	1,444,531,829	1,447	1,458,804,756
WAJO	3,819	867,529,456	4,236	933,049,651
BONTOALA	1,401	356,166,829	1,440	367,751,983
UJUNG TANAH	991	93,181,163	745	79,586,726
TALLO	4,210	893,686,322	4,247	1,009,675,193
PANAKKUKANG	10,633	7,638,330,562	12,515	8,678,407,735
BIRINGKANAYA	25,059	6,481,891,180	30,365	8,102,986,452
DAERAH PELABUHAN	3	59,199,519	2	38,145,511
RAPPOCINI	9,664	4,076,687,603	12,637	5,339,537,700
MANGGALA	18,053	3,724,553,274	21,963	4,410,135,366
TAMALANREA	14,742	7,556,733,771	17,199	9,976,208,925
JUMLAH	114,032	41,948,980,000	134,018	51,354,369,004

(Sumber: UPTD PBB Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pada tahun 2015 piutang Dispenda kota Makassar

sebesar Rp. 41.948.980.000-, dimana ada sebanyak 114.032 objek pajak yang terutang dan pada tahun 2016 piutang Dispenda kota Makassar meningkat sebesar Rp. 51.354.369.004-, dimana ada sebanyak 134.018 objek pajak yang terutang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administratif bagi wajib

pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kegunaan umum dan kegunaan khusus.

- a. Kegunaan umum dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.
- b. Kegunaan khusus dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
 2. Diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Berkaitan dengan definisi Pajak, M.J.H Smeets berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.¹

Selanjutnya Soeparman Soemahamidjaja mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²

Pajak diartikan sebagai iuran wajib, ini artinya pembayaran pajak merupakan kewajiban. Penegasan lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran pajak dilaksanakan atas dasar undang-undang, konsekuensinya apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, undang-undang akan mengatur pelaksanaan lainnya sebagai imbalan tidak terpenuhinya yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan, kesejahteraan, pembangunan, dan lain-lain merupakan manifestasi pemberian kontraprestasi bagi pembayaran pajak selaku anggota masyarakat.

Dikatakan oleh Soemitro bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

¹ Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 9.

² Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 22.

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum.³ Kata “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan.

Selanjutnya, Lima belas tahun setelah itu, Rochmat Soemitro memandang bahwa pajak dapat ditinjau dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Adapun pengertian pajak dari aspek ekonomis adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegen prestatie) yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. Sementara itu, pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (tatsbentand) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan negara.⁴

Pajak adalah pelunasan perikatan dari wajib pajak tanpa tegen prestasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan oleh pejabat pajak. Sebenarnya pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang

³ Ibid., hlm. 22.

⁴ Ibid., hlm. 23.

bernuansa publik sehingga sifatnya memaksa. Pajak berada dalam pengawasan pejabat pajak sebagai pihak yang mewakili negara dan tidak ada tegehan prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sifat yang dimiliki oleh pajak adalah bersifat memaksa dan terjelma dari aspek penagihan dengan ancaman hukuman berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.⁵

Dengan melihat pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut:⁶

1. Bahwa pajak itu adalah satu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah dapat menarik sebagian daya beli rakyat untuk Negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan ini berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada jasa timbal yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayar pajak dan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung. Prestasi dari negara seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat negara, hak

⁵ Ibid., Hlm. 23.

⁶ Ibid., Hlm. 23.

penggunaan jalan umum, hak untuk mendapatkan pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditunjukan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara. Bahkan orang miskin lebih banyak menggunakan prestasi dibanding dengan orang kaya seperti dalam hal penggunaan sarana atau kesehatan.

5. Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat penulis yang dimaksud dengan pajak adalah pungutan wajib yang bersifat memaksa yang ditetapkan oleh pemerintah kepada warganya yang akan digunakan untuk membiayai penggunaan umum.

2. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Fungsi anggaran adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan

Undang-Undang yang berlaku.⁷ Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, fungsi pajak adalah sebagai pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran memiliki keseimbangan.

b. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Fungsi mengatur adalah suatu fungsi bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dengan fungsi ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan keinginan pemerintah.⁸

c. Fungsi Pemerataan (Distribusi)

Pajak memiliki fungsi pemerataan artinya yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.⁹ Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi

⁷ Richard Burton dan Wirawan Ilyas, 2001, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 8.

⁸ Sri Pudyatmoko, 2006, *Hukum Pajak*, CV Andi offset, Yogyakarta, Hlm. 19.

⁹ Richard Burton dan Wirawan Ilyas, loc.cit.

karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi.

Di Indonesia, fungsi pajak berkembang tidak hanya dalam fungsi anggaran tetapi juga fungsi pengaturan. Menurut Ma'rie Muhammad, fungsi pajak adalah:¹⁰

1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
2. Pajak adalah alat untuk mendorong investasi;
3. Pajak merupakan alat redistribusi

Pajak ditangan pemerintah digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera dan lebih makmurnya masyarakat, lebih tinggi tingkat ekonominya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak disamping untuk melangsungkan kehidupan negara (dengan anggaran rutinnya), juga digunakan untuk pembangunan yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia (melalui anggaran pembangunan). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, Fungsi pajak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana dari masyarakat yang berlebih untuk dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk lain.

3. Jenis-Jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dapat

¹⁰ Imam Soebechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

dikelompokkan berdasarkan sifat, subjek, dan objek pajak.

1. Ditinjau dari golongan, Pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:¹¹

a. Pajak langsung

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

b. Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut apabila terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai.

2. Ditinjau dari wewenang pemungut, pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:¹²

a. Pajak negara (pusat)

Adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian keuangan dalam lingkup direktorat jendral pajak. Contohnya pajak penghasilan.

b. Pajak daerah (lokal)

Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah.

¹¹ Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 40.

¹² Ibid., hlm. 40-41.

Contohnya pajak bumi dan bangunan.

3. Ditinjau dari sifat, pajak digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:¹³

a. Pajak subjektif

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wilayah pajak.

Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul.

Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.¹⁴ Contohnya pajak penghasilan.

b. Pajak objektif

Adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru mencari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

B. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum diuraikan mengenai pengertian pajak bumi dan bangunan, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian dari pajak, bumi, dan bangunan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka yang dimaksud dengan pajak adalah pungutan wajib yang bersifat memaksa yang ditetapkan oleh pemerintah kepada warganya yang akan digunakan untuk membiayai penggunaan umum.

¹³ Ibid., hlm. 42-43.

¹⁴ R. Santoso Brotodihardjo, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, hlm. 79.

Pengertian bumi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang berada dibawahnya. Pengertian bumi secara awam dipahami sebagai tanah, sedangkan tanah pada dasarnya merupakan permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi sedikit tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian ruang yang ada diatasnya.

Pengertian bangunan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau yang dapat diusahakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan adalah iuran wajib yang dikenakan oleh negara terhadap nilai obyek pajak berupa bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan perkotaan merupakan pajak daerah. Adapun mengenai pengertian pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang perorangan atau badan (wajib pajak), kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Sedangkan pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan dan pertambangan merupakan pajak negara, adapun pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan dan pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Sektor perkebunan adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan. Hal ini diatur dalam PER-64/PJ/2010 tanggal 27 Desember 2010.
- b. Sektor perhutanan adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak atas pengusahaan hutan. Hal ini diatur dalam PER-36/PJ/2011 tanggal 18 November 2011.
- c. Sektor pertambangan adalah pajak bumi dan bangunan yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua jenis golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya. Hal ini diatur dalam PER-47/PJ/2015.

2. Sumber Hukum dan Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Di negara-negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dicantumkan Pasal 23A sebagai sumber hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal itu ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.¹⁵

¹⁵ Bohari, 2010, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang berarti bukan perampasan hak atau kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhiya dan bila ia (rakyat) tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.¹⁶

Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan bagi setiap tindakan hukum. Setiap penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara harus memiliki dasar hukum.

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar nomor 50 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kota Makassar.

3. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

a. Subjek pajak bumi dan bangunan perkotaan

Subjek pajak adalah pihak-pihak atau badan yang akan dikenakan pajak. Subjek pajak telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, namun karena terlalu luas dan berlaku secara nasional sehingga subjek pajak diatur juga dalam Peraturan

¹⁶ Ibid., hlm. 33.

Daerah. Subyek pajak bumi dan bangunan perkotaan menurut Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 adalah orang atau badan yang secara nyata :

- 1) Mempunyai suatu hak atas bumi.
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi.
- 3) Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian, wajib pajak pajak bumi dan bangunan belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut.¹⁷

b. Objek pajak bumi dan bangunan perkotaan

Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak atau dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak. Objek pajak telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, namun karena terlalu luas dan berlaku secara nasional sehingga objek pajak diatur juga dalam Peraturan Daerah. Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 yang menjadi obyek pajak bumi dan bangunan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan.

¹⁷ Aji Suryo dan Valentina Sri Sumardiyanti, 2006, *Perpajakan Indonesia*, AMP YKPN, Yogyakarta, hlm. 2

Pengertian bangunan meliputi jalanan, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dermaga, taman mewah, tempat penampungan minyak, air, gas, pipa minyak dan menara.

4. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Pengenaan adalah kegiatan penghitungan, penetapan dan pembebanan pajak terhutang dengan unsur pokok di dalamnya, berupa:

a. Tarif pajak bumi dan bangunan

Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dalam presentase.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar, Tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan ditetapkan sebesar 0,1% untuk nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari 1 Milyar dan 0,2% untuk NJOP diatas 1 Milyar.

Selanjutnya, Pasal 65 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar, Pemanfaatan pajak bumi dan bangunan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan ditetapkan sebesar 0,15% untuk NJOP kurang dari 1 Milyar dan 0,3% untuk NJOP diatas 1 Milyar.

Kemudian, Pasal 65 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar, Pemanfaatan pajak bumi dan bangunan yang ramah lingkungan dan atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, tarif pajak bumi dan bangunan perkotaan ditetapkan sebesar 0,05% untuk NJOP kurang dari 1 Milyar dan 0,1% untuk NJOP diatas 1 Milyar.

b. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

NJKP adalah besaran nilai jual objek yang akan dimasukkan kedalam perhitungan pajak terutang. Itu berarti NJKP bagian dari NJOP. NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.¹⁸

Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak yang besarnya ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-setingginya 100% dari NJOP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tahun takwim 1994, besarnya presentase NJKP adalah sebagai berikut:¹⁹

1. 40% dari NJOP untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

¹⁸ Munawir, 1998, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 261.

¹⁹ Harry Hartono dan Untung Supardi, 2010, *Membedah Pengelolaan Administrasi PBB & BPHTB*, Mitra wacana media, Jakarta, hlm. 19.

2. 40% dari NJOP untuk PBB sektor pedesaan dan perkotaan yang NJOP-nya lebih dari 1 Milyar.
3. 20% dari NJOP untuk PBB sektor pedesaan dan perkotaan yang NJOP-nya kurang dari 1 Milyar.

c. Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah pengurangan dari NJKP dalam menghitung pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, NJOPTKP adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,- dan paling tinggi Rp. 12.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, NJOPTKP di kota Makassar sebesar Rp.10.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

Besarnya NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing kabupaten atau kota. Apabila wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka NJOPTKP hanya diberikan pada objek pajak yang nilainya paling besar dan apabila wajib pajak memiliki nilai jual objek pajak sama atau lebih kecil dari NJOPTKP maka wajib pajak tersebut tidak akan dikenai pajak.

5. Tata Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Dengan dasar penghitungan di atas maka pengenaan pajak bumi dan bangunan terhutang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk yang NJKP-nya 20% = $\text{Tarif} \times 20\% (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$

b. Untuk yang NJKP-nya 40% = Tarif x 40% (NJOP-NJOPTKP)

Contoh:

- a. Toni seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2007 hanya memiliki sebuah objek pajak berupa bumi di kawasan Sudiang dan diketahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi tersebut sebesar Rp. 8.000.000,-, Berapakah Besar PBB yang terhutang pada tahun 2007 milik Toni?

Jawab:

Karena besarnya NJOP kurang dari Rp. 10.000.000,- maka objek pajak tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah Rp. 500.000,- sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp. 1.000.000,- Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin?

Jawab:

Pertama, kita hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya:

Bangunan: 50 x Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,-

Tanah: 100 x Rp. 1.000.000 = Rp. 100.000.000,-

Kedua, kita hitung NJOP nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah:

Nilai Bangunan: Rp. 25.000.000,-

Nilai Tanah: Rp. 100.000.000,-

----- +

Rp. 125.000.000,-

NJOP – NJOTKP = Rp. 125.000.000,- — Rp. 10.000.000,-

$$= \text{Rp. 115.000.000,-}$$

$$\text{NJKP} = 20\% \times \text{Rp. 115.000.000,-} = \text{Rp. 23.000.000,-}$$

$$\text{PBB} = 0,1\% \times \text{Rp. 23.000.000,-} = \text{Rp. 23.000,-}$$

- c. Tuan Poneng adalah seorang pengusaha terkenal memiliki 2 buah rumah. Objek pertama terletak di jalan tupai dan objek kedua terletak di hertasning. Diketahui objek pertama NJOP bumi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 M) dan NJOP bangunan Rp. 3.500.000,- (3,5 M) sedangkan untuk yang kedua diketahui NJOP bumi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 M) dan NJOP Bangunan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (4,5 M). Hitunglah PBB terhutang Tuan Poneng atas kedua objek tersebut.

Jawab:

NJOP terbesar adalah terletak pada NJOP di jalan hertasning dengan :

$$\text{NJOP Bumi} = \text{Rp. 1. 000.000.000,-}$$

$$\text{NJOP Bangunan} = \text{Rp. } \underline{4.500.000.000,-} +$$

NJOP sbg dasar

$$\text{Penaan PBB} = \text{Rp. 5.500.000.000,-}$$

$$\text{NJOPTKP} = \text{Rp. } \underline{10.000.000,- (-)}$$

NJOP utk

$$\text{Perhitungan PBB} = \text{Rp. 5.490.000.000,-}$$

Sedangkan untuk di jalan tupai:

$$\text{NJOP Bumi} = \text{Rp. 1.000.000.000,-}$$

$$\text{NJOP bangunan} = \underline{\text{Rp. 3.500.000.000,-} +}$$

NJOP sebagai dasar

Pengenaan PBB = Rp. **4.500.000.000,-**

NJOPTKP = Rp. 0,- (-)

NJOP utk

Perhitungan PBB = Rp. **4.500.000.000,-**

NJOP = NJOP Bumi + NJOP Bangunan = Rp. 5.490.000.000 + Rp.
4.500.000.000,- = Rp. **9.990.000.000.**

PBB Terhutang = Tarif x NJKP = Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,2% x 40% x 9.990.000.000.

= Rp. **7.992.000,-**²⁰

6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang pokoknya mengatur hal-hal berikut:²¹

- a. Jangka waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), selambat-lambatnya enam bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- b. Jangka waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP), selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.

²⁰ Goes Manurung, 2012, "Ebook Master",
<http://makalahindonesiaterbaru.blogspot.co.id/2012/02/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb.html>, Diakses pada tanggal 22 desember 2016.

²¹ Didik Windiarto, *Skripsi Administrasi Negara*, <https://www.scribd.com/doc/77999617/SKRIPSI-ADMINISTRASI-NEGARA-Penerapan-Sanksi-Administrasi-Terhadap-Ketidakpatuhan-Membayar-Pajak-Bumi-Dan-Bangunan-Pbb-Di-Kecamatan-Sungkai-Selatan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2017

- c. Denda administrasi terhadap pajak yang terhutang (tidak atau kurang bayar) setelah jatuh tempo sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sesuai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan.
- d. Penagihan dengan surat tagihan pajak (STP) harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
- e. SPPT, SKP, dan STP merupakan dasar penagihan pajak.
- f. Surat paksa untuk pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayar pada waktunya.
- g. Pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada Gubernur atau Walikota/Bupati.

Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:²²

- a. Pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- b. Pajak yang terutang yang berdasarkan Surat ketetapan pajak (SKP) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.
- c. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran yang tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

²² Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi offset, Yogyakarta, hlm. 319.

- d. Denda administrasi sebagaimana yang dimaksud di nomor 3 ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak (STP) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
- e. Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lainnya yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- f. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

C. Sanksi Administrasi

1. Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi merupakan perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku menyimpang. Sanksi administrasi adalah pengenaan bunga, denda atau kenaikan atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi tidak tertuju pada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. Sekalipun sifatnya memaksa, pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat dan daerah tidak boleh sewenang-wenang menerapkannya, agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak. Sanksi ini bukan sebagai penghukum namun mengingatkan wajib Pajak agar teliti dan berhati-hati.

Menurut Philipus M Hadjo, Sanksi administrasi terdiri dari:²³

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) , yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula terhadap hal yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan.
- c. Pengenaan denda administrasi yang bersifat penambahan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan, sanksi ini biasanya terdapat dalam hukum pajak, jaminan sosial, dan hukum kepegawaian.
- d. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*) diterapkan terhadap warga negara yang tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau

²³ Didik Windiarto, *Skripsi Administrasi Negara*, <https://www.scribd.com/doc/77999617/SKRIPSI-ADMINISTRASI-NEGARA-Penerapan-Sanksi-Administrasi-Terhadap-Ketidakpatuhan-Membayar-Pajak-Bumi-Dan-Bangunan-Pbb-Di-Kecamatan-Sungkai-Selatan>, diakses pada tanggal 25 Januari 2017

kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peratran perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ternyata sanksi administrasi merupakan bagian tak terpisahkan dengan utang pajak. Pada hakikatnya, Pasal 1 ayat (8) undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) undang-undang ketentuan umum perpajakan.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan.

1) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam rangka menegakkan hukum pajak.²⁵

Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Misalnya, terkait keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dimana batas waktu penyampaiannya telah

²⁴ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali pers, Jakarta, Hlm. 250.

²⁵ Ibid., hlm. 255.

ditentukan, maka sanksi dendanya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.²⁶

2) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran hukum pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Dimana kewajiban tersebut adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak.²⁷

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi tiga yaitu bunga pembayaran karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, bunga penagihan karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan, dan bunga ketetapan karena bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak.²⁸

Bunga pada umumnya dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dan dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Misalnya, pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPT yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai bunga 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang diatur

²⁶ Asep Jumhana, 2014, *Ketidakadilan Sanksi Bunga Akibat Pembetulan SPT*
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20297-ketidakadilan-pengenaan-sanksi-bunga-akibat-pembetulan-spt>, diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

²⁷ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali pers, Jakarta, Hlm. 250.

²⁸ Mardiasmo, 2004, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm.41.

dalam Pasal 9 ayat (2A) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.²⁹

3) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang. Pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.³⁰

Kenaikan dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tertentu. Misalnya, terkait dengan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan pembukuan, sanksi kenaikan akan dikenakan sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.³¹

2. Sanksi Administrasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Sanksi administrasi dalam pajak bumi dan bangunan adalah sanksi yang berkaitan tidak memenuhi kewajiban undang-undang.³² Sanksi administrasi yang

²⁹ Asep Jumhana, 2014, *Ketidakadilan Sanksi Bunga Akibat Pembetulan SPT* <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20297-ketidakadilan-pengenaan-sanksi-bunga-akibat-pembetulan-spt>, diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

³⁰ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali pers, Jakarta, Hlm. 258.

³¹ Asep Jumhana, 2014, *Ketidakadilan Sanksi Bunga Akibat Pembetulan SPT* <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20297-ketidakadilan-pengenaan-sanksi-bunga-akibat-pembetulan-spt>, diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

³² Eny Supriпти dan Setu Setyawan, 2004, *Perpajakan*, Bayu Media, Malang, hlm.297.

dikenakan terhadap wajib pajak pajak bumi dan bangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebagai berikut :³³

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), Walaupun telah ditegur secara tertulis dikenai sanksi berupa denda 25% dari pokok. Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) yaitu:

Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa :

“Surat pemberitahuan objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, harus di isi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan objek pajak dan subjek pajak.”³⁴

Pasal 10 ayat (2) huruf a, menyebutkan bahwa:

“Apabila surat pemberitahuan objek pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.”³⁵

Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Jumlah pajak terutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.”³⁶

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi

³³ Aji Suryo dan Valentina Sri Sumardiyanti, 2006, *Perpajakan Indonesia*, AMP YKPN, Yogyakarta, hlm. 4.

³⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

³⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

³⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

berupa denda 25% dari selisih pajak terutang. Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (4) yaitu:

Pasal 10 ayat (2) huruf b, menyebutkan bahwa:

“Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihutangkan berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.”³⁷

Pasal 10 ayat (4), menyebutkan bahwa:

“Jumlah pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak terhutang.”³⁸

- c. Membayar atau kurang bayar. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Hal tersebut telah dirumuskan dalam pasal 11 ayat (3) yaitu:

“Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung pada saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.”³⁹

3. Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administrasi

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.⁴⁰ Kewenangan adalah

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

³⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

³⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

⁴⁰ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 98.

kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Dalam hal penjatuhan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, Walikota memberi mandat kepada kepala dinas pendapatan daerah atau kepala instansi lainnya yang tugas dan fungsinya memungut pajak bumi dan bangunan perkotaan. Dimana penjatuhan sanksi administrasinya telah diatur dalam Peraturan walikota Makassar nomor 50 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kota Makassar.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Pelaksanaan suatu aturan hukum sangat mempengaruhi efisien dan efektif tidaknya aturan yang diberlakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain :⁴¹

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja,

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 17.

Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut :

(1) peranan yang ideal / *ideal role* ; (2) peranan yang seharusnya / *expected role*; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri / *perceived role*; dan (4) perana yang sebenarnya dilakukan / *actual role*. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain : (1) istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga

aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain :

1. hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;

9. hukum diartikan sebagai jalinan nilai;

10. hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estetik yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis sosiologis (*sociology legal approach*) mengingat yang diteliti adalah penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Yuridis artinya dalam penelitian ini menekankan pada peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan sosiologis disini berarti dalam penelitian ini menekankan pada gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan penerapan sanksi-sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan daerah kota Makassar karena banyaknya piutang Dispenda dalam hal pemungutan pajak bumi dan bangunan.

⁴² Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandungm hlm. 88.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, populasinya adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di kota Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 9 Orang. 3 Pegawai Dispenda dan 6 wajib pajak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *simple random sampling*, yakni cara pengambilan secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber (informan) berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat yang berkaitan langsung dengan masalah penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi (literatur), peraturan perundang-undangan, serta data-data yang diperoleh dari kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam hal ini narasumbernya adalah kepala UPTD PBB, Staff UPTD PBB, dan beberapa masyarakat yang membayar serta masyarakat yang terutang pajak bumi dan bangunan.

2. Dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (library research)

Dokumentasi atau disebut juga dengan studi pustaka (library research) dilakukan dengan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, dan situs internet.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di temukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang peroleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudiaan dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisi data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas pasar, Dinas Air Minum, dan Dinas Penghasilan daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya No. 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengolahan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor, dan Sub Dinas Administrasi.

Dengan adanya keputusan Walikotamadya Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 74/S/Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersamaan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 3/12/43 tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 No. Keu/3/22/33 tentang Pembentukan Dinas Pendaptan Daerah di Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan, maka Dinas Penghasilan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar, dan Sub Dinas Perlelangan Ikan dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, maka secara otomatis

nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Makassar.

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Makassar

Adapun kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dispenda kota Makassar diatur dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas pokok

Berkaitan dengan kedudukan Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah.

c. Fungsi

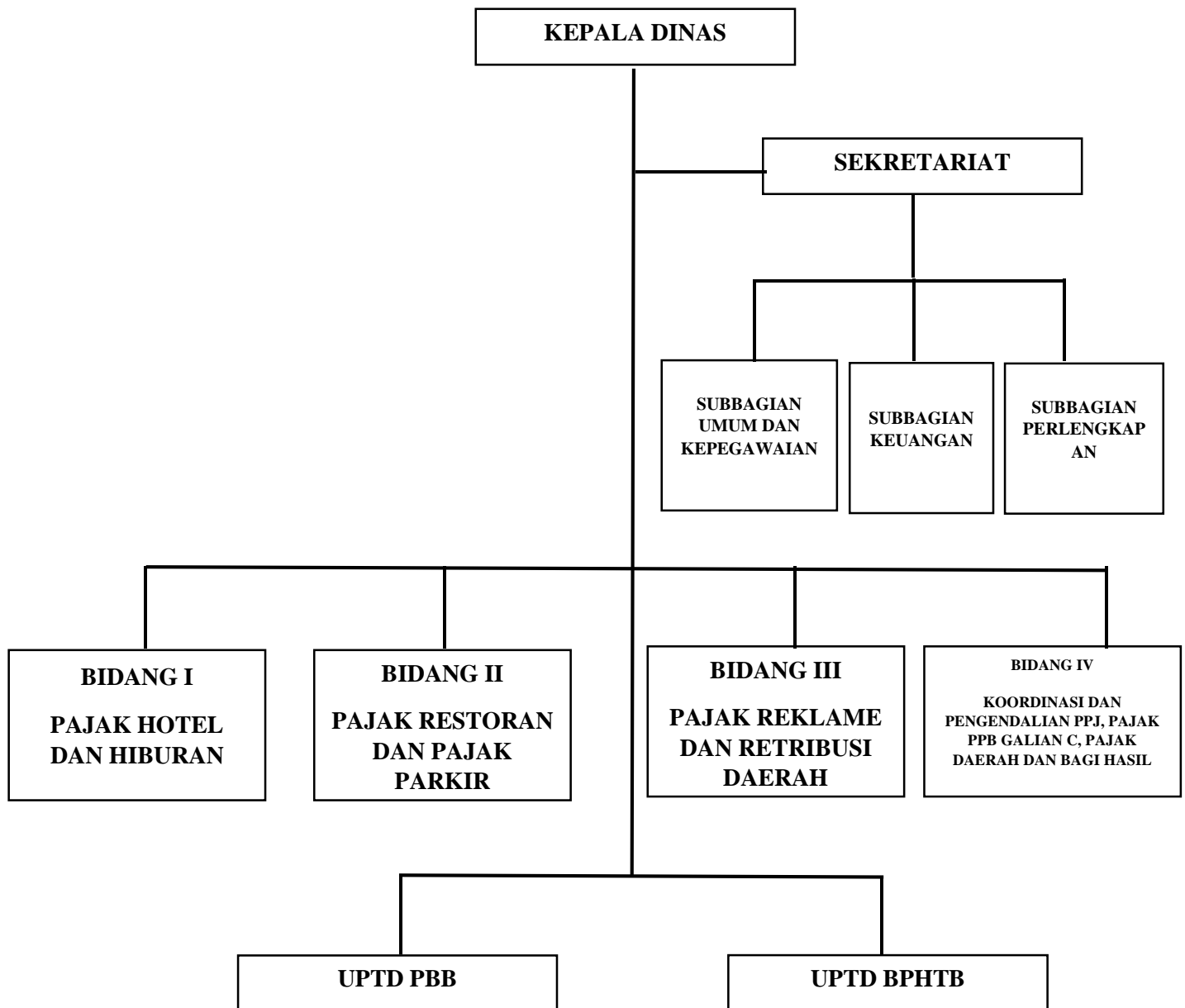
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 2) Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah;
- 3) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang

pendataan, penetapan, keberatan dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan batu galian golongan C, serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya;

- 4) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 5) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- 7) Pembinaan unit pelaksanaan teknis.

2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar



(Sumber: Dinas pendapatan daerah kota Makassar)

2. Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah

Kota Makassar

a. Kepala dinas

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

b. Sekretariat

Sekretariat dinas dipimpin sekretaris dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengelolaan kesekretariatan;
- 2) pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- 3) pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- 4) pelaksanaan urusan perlengkapan;
- 5) pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- 6) pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
- 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Subbagian umum dan kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola

administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. dalam melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- 2) mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
- 3) melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- 4) melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- 5) melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
- 6) menghimpun dan mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
- 7) menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- 8) melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 9) melakukan koordinasi pada sekretariat korpri kota Makassar;
- 10) melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri pada unit kerja masing-masing;
- 11) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Subbagian keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. dalam melaksanakan tugas subbagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyusun rencana dan program kerja subbagian keuangan;
- 2) mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 3) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke bappeda melalui kepala dinas;
- 4) menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- 5) mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi dari masing-masing satuan kerja;
- 6) menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan subbagian perlengkapan;
- 7) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

e. Subbagian perlengkapan

Subbagian perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta

mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas subbagian perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyusun rencana dan program kerja dinas pendapatan;
- 2) menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
- 3) membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
- 4) membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
- 5) membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- 6) menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
- 7) menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada dinas pendapatan;
- 8) melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
- 9) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang I pajak hotel dan hiburan

Bidang I pajak hotel dan hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan. dalam melaksanakan tugas bidang I pajak hotel dan hiburan menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan;
- 3) melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 5) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

g. Bidang II pajak restoran dan parkir

Bidang II pajak restoran dan parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak restoran dan pajak parkir. dalam melaksanakan tugas, Bidang II pajak restoran dan pajak parkir menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak restoran dan pajak parkir;
- 3) melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; pengelolaan administrasi urusan tertentu.

h. Bidang III pajak reklame dan retribusi daerah

Bidang III pajak reklame dan retribusi daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan dan pelaporan pajak reklame dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang III pajak reklame dan retribusi daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak reklame dan retribusi daerah;
- 3) melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak;
- 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- 5) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

i. Bidang IV koordinasi, pengendalian pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan c, pajak daerah dan bagi hasil

Bidang IV koordinasi, pengendalian pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan c, pajak daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam

melaksanakan tugas, Bidang IV koordinasi, pengendalian pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan c, pajak daerah dan bagi hasil menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 3) mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
- 4) koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- 5) pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- 6) melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- 8) pengelolaan administrasi urusan tertentu.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PBB DISPENDA Kota Makassar

Adapun tugas pokok, dan fungsi UPTD PBB DISPENDA kota Makassar terdapat pada Pasal 4 Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, sebagai berikut:

b. Tugas pokok

UPTD PBB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis,

pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pemungutan pendapatan pajak bumi dan bangunan dalam daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD PBB menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pemungutan pendapatan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- 2) Melaksanakan kegiatan administrasi pemungutan pendapatan pajak bumi dan bangunan;
- 3) Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak bumi dan bangunan;
- 4) Melaksanakan penyuluhan, penagihan dan membantu melaksanakan pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan;
- 5) Melaksanakan pengaduan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPTD PBB;
- 6) Melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPTD PBB;
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

B. Penerapan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan keseluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Dengan pengalihan ini, penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan akan sepenuhnya masuk ke pemerintahan kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD).

Di kota Makassar sendiri, pemerintah kota Makassar mengambil alih kewenangan tersebut pada bulan Januari 2013. Dalam beberapa bulan setelah mengambil alih kewenangan untuk mengelolah pajak bumi dan bangunan perkotaan, Dinas pendapatan daerah (Dispenda) kota Makassar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai keputusan yang sudah ditetapkan oleh direktorat jendral pajak (DJP) pada tahun 2011 agar kiranya pajak daerah dan retribusi bisa dimaksimalkan dengan baik guna meningkatkan PAD di kota Makassar.

Pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota Makassar dilaksanakan oleh Dispenda melalui unit pelaksana teknis dinas pajak bumi dan bangunan (UPTD PBB). Adapun kewenangan yang dialihkan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota antara lain proses pendataan, penilaian, penetapan pengadministrasian, penagihan, dan pelayanan pajak.

Dalam hal penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi

administrasi dalam pajak bumi dan bangunan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), Walaupun telah ditegur secara tertulis dikenai sanksi berupa denda 25% dari pokok.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% dari selisih pajak terutang.
- c. Membayar atau kurang bayar. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafrin MD selaku staf UPTD PBB, mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan sanksi administrasi pada dinas pendapatan daerah kota Makassar selama ini hanya menerapkan sanksi administrasi berupa denda 2%, sanksi administrasi berupa denda 25% tidak diterapkan karena kami sering melakukan monitoring dan pendataan kembali tiap tahun sehingga tidak ada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP dan tidak ada jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP.”⁴³

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa di Dispenda kota Makassar, jenis sanksi yang diterapkan hanya berupa denda 2% sebab tidak ada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP maupun jumlah pajak terutangnya lebih besar dari jumlah pajak di SPOP sehingga denda sebesar 25% tidak pernah diterapkan.

⁴³ Hasil wawancara pada tanggal 23 Januari 2017.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kota Makassar mengatur mengenai sanksi administrasi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang pada saat jatuh tempo tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar pada utang pajaknya. Sanksi administrasi perpajakan tersebut berupa denda 2%.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Adrianto Adnan selaku kepala UPTD PBB yang mengatakan bahwa:

“Pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar, penerapan sanksi administrasi dilakukan setelah jatuh tempo yaitu bulan September sebesar 2% dari pokok pajak terutang yang penagihan pajaknya berdasarkan SPPT bukan berdasarkan SKP. Selanjutnya apabila wajib pajak tersebut tidak membayar maka akan diberikan surat teguran. Adapun proses penerapan sanksinya sudah jelas 2% selanjutnya kami melakukan koordinasi dengan camat untuk memberikan surat teguran kepada si wajib pajak.”⁴⁴

Untuk lebih jelas alur penerapan sanksi, beliau juga memaparkan mengenai proses pelaksanaan sanksi yaitu:

- a. Setelah SPPT disampaikan oleh petugas pajak dalam hal ini dibantu oleh ketua RT masing-masing wilayah kepada wajib pajak, si wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dalam toleransi waktu yang diberikan yaitu sampai dengan bulan September.
- b. Setelah itu petugas pemungut pajak dalam hal ini dibantu oleh ketua RT masing-masing wilayah akan memberitahukan bahwa si wajib pajak yang dimaksud belum memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dalam waktu yang telah ditentukan.

⁴⁴ Hasil wawancara pada tanggal 23 Januari 2017.

- c. Baru setelah itu wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dari pokok pajak yang dihitung setelah lewat masa toleransi pembayaran dan pembayaran dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau BPD atau kantor pos.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Indirwan Dermayasair selaku kepala tata usaha UPTD PBB, yang mengatakan bahwa:

“ Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak bumi dan bangunan ada pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 yang dimana telah diatur bahwa sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 2% perbulan dengan maksimal 48% dalam kurun 2 tahun. Jadi ketika lebih dari 2 tahun maka besar jumlah sanksinya tidak bisa naik lagi. Contohnya jumlah pajak bumi dan bangunan seorang wajib pajak adalah sebesar Rp. 1.000.000-, maka denda yang dikenakan apabila ia tidak membayar yaitu sebesar Rp. 20.000-, selanjutnya bulan kedua ia tetap belum bayar maka dendanya menjadi Rp. 40.000-, setelah 2 tahun maka ia mentok di Rp. 960.000-, atau jumlah maksimal. Walaupun wajib pajak tersebut membayar 4 tahun kemudian maka dendanya tetap Rp. 960.000-,. Denda yang dikenakan dalam pajak bumi dan bangunan hanya sanksi administrasi tidak ada denda lain walaupun ada sanksi yang lain palingan hanya pemasangan spanduk bagi wilayah-wilayah yang belum bayar.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, di Dispenda kota Makassar, sanksi administrasi telah diterapkan bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan yaitu sebesar 2% perbulan setelah jatuh tempo dan maksimal 48%. Dengan kata lain, sanksi yang diterapkan di Dispenda sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2012, yang mengatur “Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2%, yang dihitung pada saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dengan jangka waktu paling lama 24%”.

⁴⁵ Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2017.

Berikut ini disajikan contoh penghitungan pajak bumi dan bangunan perkotaan yang terlambat bayar dan telah dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dari pokok pajak terutang:

SPPT tahun 2014 diterima tanggal 1 Februari 2014 dengan pajak terutang sebesar Rp. 150.000-, sesuai dengan ketentuan, jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan tersebut adalah 30 September 2014. Dalam contoh kasus ini si wajib pajak baru membayar pada tanggal 30 November 2014, jadi ia terlambat selama 2 bulan. Maka besarnya denda yang dikenakan adalah $2 \times 2\% \times \text{Rp. } 150,000\text{-} = \text{Rp. } 6000\text{-}$, jadi pajak yang harus dibayar adalah $\text{Rp. } 150.000\text{-} + \text{Rp. } 6000\text{-} = \text{Rp. } 156.000\text{-}$,

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa jenis sanksi administrasi yang diterapkan bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota Makassar hanya berupa denda administrasi sebesar 2% dimana penerapannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun alasan pengenaan sanksi tersebut adalah agar wajib pajak pajak bumi dan bangunan perkotaan segera membayar kewajibannya sehingga target anggaran yang berasal dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dapat tercapai dan terciptanya tertib administrasi bidang perpajakan serta adanya kepastian hukum dalam hal pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan objek pajak bumi dan bangunan perkotaan. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga piutang Dispenda masih mencapai Milyaran. Adapun monitoring dan pendataan yang dilakukan oleh Dispenda sudah berjalan dengan baik. Ini terbukti dari tidak adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP dan tidak ada juga yang jumlah pajak

terutangnya lebih besar dari jumlah pajak di SPOP sehingga tidak perlu lagi diterapkan sanksi berupa denda 25%.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi adalah unsur-unsur penting yang akan sangat membantu dalam pelaksanaan penagihan guna mencapai hasil yang diinginkan.

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Syafrin MD selaku staf UPTD PBB:

“Faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak membayar pajak bumi dan bangunan yaitu faktor kesadaran wajib pajak tentang pembayaran pajak, faktor ekonomi, faktor pemahaman tentang perpajakan, dan faktor sumber daya manusia. Adapun faktor pendukung wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan adalah kemudahan dalam pembayaran dimana pembayarannya sudah bisa disemua unit BPD dan juga kami sudah bekerja sama dengan kantor pos.”⁴⁶

1. Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Seorang wajib pajak harus menyadari bahwa dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. Dengan begitu wajib pajak akan membayar pajaknya karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Apabila kesadaran wajib pajak tinggi untuk membayar pajak maka kepatuhan membayar pajak pun akan tinggi dan akan menambah pendapatan daerah. Dan apabila wajib pajak telah memenuhi dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak akan membayar pajaknya.

⁴⁶ Hasil wawancara pada tanggal 23 Januari 2017.

Berikut wawancara penulis dengan Ibu Rahmiwan Puri selaku wajib pajak dari kecamatan Rappocini:

“Bayar pajak itu sangat penting. Sekarang pembayaran pajak sudah bisa dimana-mana sehingga kita tidak perlu lagi antri di Dispenda. Dulu orang malas membayar pajak karena harus antri berjam-jam.”⁴⁷

Dan juga penulis melakukan wawancara dengan Ibu Esse selaku wajib pajak dari kecamatan Tamalanrea:

“Saya tidak pernah menunggak membayar pajak karena tiap tahun pak RT datang kerumah untuk memberitahu. Saya bayar tepat waktu agar tidak dikenakan denda.”⁴⁸

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kedua wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayra pajak. Adapun faktor pendukungnya yaitu kemudahan dalam pembayaran.

Namun ada juga wajib pajak yang belum memiliki kesadaran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Muliyanto selaku wajib pajak dari kecamatan Rappocini:

“Saya beberapa kali didenda karena terlambat bayar. Ini dikarenakan saya sibuk sehingga tidak ada waktu untuk pergi membayar”⁴⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Mutmainnah selaku wajib pajak dari kecamatan Tallo:

“Saya sering lupa membayar pajak sehingga sering didenda”⁵⁰

⁴⁷ Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2017.

⁴⁸ Hasil wawancara pada tanggal 3 Februari 2017.

⁴⁹ Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2017.

⁵⁰ Hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2017.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Rini selaku wajib pajak dari kecamatan Tamalate:

“Dalam membayar pajak kadang saya didenda. Tapi karena dendanya sedikit jadi tidak terlalu masalah”⁵¹

Berdasarkan ketiga wawancara diatas dapat dilihat bahwa ada juga beberapa wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah untuk membayar pajak.

2. Faktor Ekonomi

Walaupun wajib pajak memiliki sebidang tanah atau beberapa bidang tanah, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Beberapa wajib pajak adalah orang yang memiliki penghasilan rendah atau dalam golongan ekonomi rendah sehingga tidak mampu membayar pajak untuk tanah yang dimilikinya. Adakalanya wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan tersebut adalah wajib pajak yang mendapatkan tanah dari hibah atau warisan orangtua mereka. Kebanyakan dari mereka berpikir dari pada membayar denda lebih baik mencukupi kebutuhan hidup yang semakin mahal.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Iwan selaku wajib pajak dari kecamatan Manggala:

“Saya tidak bayar pajak dari tahun 2011, saya kesini mau tahu berapa yang harus saya bayar. Nantinya saya akan coba bayar sedikit-sedikit karena saya tidak punya banyak uang. Ini rumah sebenarnya rumah orang tua saya tapi beliau sudah meninggal.”⁵²

⁵¹ Hasil wawancara pada tanggal 3 Februari 2017.

⁵² Hasil wawancara pada tanggal 26 Januari 2017.

3. Faktor Pemahaman Tentang Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak tahu tentang sanksi administrasi. Dari keenam wajib pajak yang penulis wawancarai, hanya satu yang mengetahui tentang sanksi administrasi, selebihnya hanya membayar sesuai dengan denda yang tertera di SPPT tanpa mengetahui sanksi apa yang dikenakan.

Dari pernyataan-pernyataan diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan di kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

- a. Kemudahan dalam pembayaran karena UPTD PBB bekerja sama dengan BPD dan kantor pos.
- b. Adanya kesadaran wajib pajak mengenai dampak dari pembayaran pajak.

2. Faktor penghambat

- a. Kurangnya kesadaran beberapa wajib pajak yang menganggap bahwa

pajak merupakan beban masyarakat kecil. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah.

- b. Wajib pajak adalah orang yang memiliki penghasilan rendah atau dalam golongan ekonomi rendah sehingga tidak mampu membayar pajak untuk tanah yang dimilikinya.
- c. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sanksi administrasi.

Untuk mengatasi kondisi diatas, pemerintah pusat telah membuat kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.04/1999 tentang pengurangan PBB. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Surat Keputusan Menteri RI Nomor 362/KMK.04/1999 dikemukakan bahwa, dalam kondisi tertentu wajib pajak dapat mengajukan pengurangan PBB dengan alasan:

- a. Objek pajak berupa pertanian/perkebunan/pertenakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi.
- b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan ekonomi.
- c. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi.
- d. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi.

- e. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
- f. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, berdasarkan wawancara dengan Bapak Adrianto Adnan selaku kepala UPTD PBB, upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Memberi himbauan atau teguran kepada wajib pajak yang terkena sanksi agar patuh dan segera melaksanakan kewajibannya. pemberitahuan dan teguran tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti aparat kecamatan atau ketua-ketua RT.
- b. Mengadakan sosialisasi tiap tahun tentang pajak bumi dan bangunan yang diharapkan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat tergugah untuk membayar pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota Makassar telah diterapkan dengan benar oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Faktor pendukung: kemudahan dalam pembayaran dan adanya kesadaran wajib pajak.
 - b. Faktor penghambat: Kurangnya kesadaran wajib pajak, faktor ekonomi, dan kurangnya pemahaman tentang perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya, diharapkan para petugas pemungut pajak bumi dan bangunan perkotaan dapat memberikan pelayanan dan informasi yang terbaik bagi wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran dan sanksi

administrasi bagi wajib pajak agar wajib pajak dapat mengetahui proses dan kewajibannya.

2. Dalam menjalankan kewajibannya, diharapkan wajib pajak mempunyai kesadaran membayar pajak tepat waktu karena itu akan bermanfaat juga bagi wajib pajak. Dengan pembayaran yang tepat waktu, maka pendapatan daerah yang berasal dari pajak juga akan tepat dan pembangunan di daerah pun akan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aji Suryo dan Valentina Sri Sumardiyanti. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Bohari. 2010. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Eny Supriпти dan Setu Setyawan. 2004. *Perpajakan*. Malang: Bayu Media.
- Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harry Hartono dan Untung Supardi. 2010. *Membedah Pengelolaan Administrasi PBB & BPHTB*. Jakarta: Mitra wacana media.
- Imam Soebechi. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir. 1998. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Richard Burton dan Wirawan Ilyas. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- R. Santoso Brotodihardjo. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sri Pudyatmoko. 2006. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi offset.
- Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Jurnal

- Pancawati Hardiningsih, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Pajak". Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan. Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank. Vol. 3 No. 1 November 2011.

Internet

- Asep Jumhana. 2014. *Ketidakadilan Sanksi Bunga Akibat Pembetulan SPT* <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20297ketidakadilan-pengenaan-sanksi-bunga-akibat-pembetulan-spt>. diakses pada tanggal 25 Januari 2017.

Didik Windiarto. *Skripsi Administrasi Negara*.

<https://www.scribd.com/doc/77999617/SKRIPSIADMINISTRASINEGRA-Penerapan-Sanksi-AdministrasiTerhadapKetidakpatuhanMembayar-PajakBumi-Dan-Bangunan-Pbb-Di-Kecamatan-Sungkai-Selatan>. diakses pada tanggal 25 Januari 2017

Goes Manurung. 2012, "*Ebook Master*".

<http://makalahindonesiaterbaru.blogspot.co.id/2012/02/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb.html>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2016.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 0411-453101 FAX.0411-424353
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/ U/63/BPD-SEK.U/II/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **SITI HARDIYANTI DUMBI**
NIM / Jurusan : **B12113313/Hukum Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin**
Alamat : **Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar**
Judul : **"PENERAPAN SAKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR"**

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak **20 Januari s/d 19 Februari 2017** pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 Februari 2017


KEPALA BADAN
Drs. H. Irwan R. Adnan, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19710303 199803 1 014

Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul-sel di Makassar
2. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul-sel di Makassar
3. Wakil Dekan Bid. Komunitas dan Alumni Fak Hukum UNHAS Makassar di Makassar
4. **Siti Hardiyanti Dumbi**
5. Arsip.